

PROGRAM SUBSIDI PANTI DEMI KELANGSUNGAN PELAYANAN PANTI SOSIAL (Studi di Kota Medan - Sumatera Utara)

Suradi

ABSTRAK

Sebagai mitra kerja dalam usaha kesejahteraan sosial, panti sosial perlu memperoleh dukungan dari pemerintah, sehingga dalam situasi krisis ekonomi panti-panti sosial tersebut tetap dapat memberikan pelayanan sosial. Sebagai respon terhadap kondisi panti-panti sosial, Departemen Sosial menyelenggarakan program subsidi panti. Untuk mengetahui pemanfaatan subsidi panti maupun dukungan dan kendala dalam operasionalnya, dilakukan penelitian evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa program tersebut telah memberikan manfaat, yaitu peningkatan kualitas permakanan dan pemberian makanan tambahan. Sementara itu subsidi di bidang UEP, pengaruhnya belum signifikan. Belum signifikannya pengelolaan UEP ini menyebabkan panti-panti sosial masih bergantung program subsidi pemerintah.

I. PENDAHULUAN

Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial masyarakat merupakan wujud nyata dari peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 1, yaitu : "setiap warga negara berhak atas taraf kehidupan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin untuk ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial". Kemudian ditegaskan pada pasal 8, yaitu : "masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijakan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan".

Peran serta dimaksud tidak terbatas pada pengurangan penyandang masalah sosial, tetapi panti sosial memberikan pelayanan sosial secara terorganisasi yang ditujukan untuk membantu perorangan dan kelompok-kelompok mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan. Selain itu membantu mengembangkan hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan seseorang dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraannya (Freidlander dan Khan dalam Soetarso, 1980).

Panti-panti sosial telah memberikan kontribusi yang nyata menangani permasalahan

sosial, baik keterlantaran, kecacatan dan ketunaan sosial. Kinerja panti-panti sosial tersebut patut memperoleh apresiasi dan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, agar panti-panti sosial itu dapat memberikan pelayanan sosial secara berkelanjutan. Pemerintah melakukan regulasi berkaitan dengan kemudahan bagi panti-panti sosial untuk mengakses sumber daya dibarengi regulasi pemberdaya, sehingga mereka memiliki kompetensi memberikan pelayanan sosial. Pemerintah perlu melakukan promosi atas peran panti-panti sosial, dan mendorong elemen masyarakat untuk mendukung aktivitas dan program.

Selama ini pemerintah cq Departemen Sosial, menempatkan panti-panti sosial mitra kerja, khususnya dalam pelayanan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada panti-panti sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara yang tidak beruntung, sekaligus apresiasi terhadap panti-panti sosial. Meskipun demikian, terdapat ketidakseimbangan antara anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu panti dan anggaran yang dimiliki oleh panti sendiri dengan kebutuhan operasional panti-panti sosial. Kondisi ini menyebabkan panti-panti sosial kesulitan mengembangkan diri, terutama memenuhi standar pelayanan sosial yang mencakup aspek sumber daya manusia, sarana, dan program.

Ilustrasi tadi menunjukkan kondisi paradoks. Di satu sisi panti-panti sosial diharapkan berperan dalam penanganan masalah sosial, tetapi di sisi lain mereka menghadapi keterbatasan dalam menyelenggarakan kegiatannya. Kondisi panti-panti sosial mengalami kesulitan ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang dampaknya masih dirasakan. Umumnya panti-panti sosial merasa semakin berat dalam membiayai kegiatan pelayanan sosial yang harus ditanggung. Kondisi ini apabila berlangsung lama tentu mengancam kelangsungan panti-panti sosial tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

Respon atas permasalahan yang dihadapi oleh panti-panti sosial sebagai dampak krisis ekonomi, pemerintah melalui Departemen Sosial menyelenggarakan "program subsidi Panti". Subsidi panti disalurkan oleh pemerintah cq Departemen Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi dengan tujuan menekan dampak negatif krisis ekonomi terhadap kelangsungan pelayanan pada panti-panti sosial. Program subsidi panti ini diharapkan dapat mengurangi beban pembiayaan yang dihadapi oleh panti-panti sosial di Provinsi Sumatera Utara, sehingga mereka dapat menyelenggarakan pelayanan sosial secara berkelanjutan pada saat krisis ekonomi ini. Pada tahun 2005, panti-panti sosial di Provinsi Sumatera Utara yang menerima program subsidi panti sebanyak 109 unit dengan jumlah klien 5.712 orang. Sedangkan khusus di Kota Medan sebanyak 27 panti sosial dengan jumlah klien 1.653 orang, yang rinciannya sebagaimana pada tabel berikut :

PANTI SOSIAL PENERIMA PROGRAM SUBSIDI

NO	JENIS PANTI	PANTI	KLIEN
1.	Panti Sosial Asuhan Anak	18	1.245
2.	Panti Sosial Tresna Werdha	1	50
3.	Panti Sosial Penyandang Cacat	5	223
4.	Panti Sosial Pamardi Putra	3	135
JUMLAH		27	1.653

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, 2005 dan Dinas Sosial Kota Medan, 2005.

Terselenggaranya program subsidi panti ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah pusat terhadap usaha kesejahteraan sosial yang dikelola oleh masyarakat. Departemen Sosial menyadari, bahwa lembaga pelayanan kesejahteraan sosial merupakan instalasi terdepan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dimana mereka sudah sekian lama menjadi mitra kerja Departemen Sosial maupun instansi sosial di daerah. Peran aktif dari lembaga pelayanan sosial yang dikelola oleh masyarakat, dewasa ini telah memberikan kontribusi yang semakin nyata dan bermakna. Departemen Sosial tentunya mencermati, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pelayanan kesejahteraan sosial merupakan sebuah gerakan arus bawah di bidang kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, penyaluran subsidi kepada panti-panti sosial merupakan salah satu upaya memperkuat kemitraan antara Departemen Sosial dengan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial (panti-panti sosial), dan dalam rangka memperkuat gerakan arus bawah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Untuk dapat mengetahui sejauhmana program subsidi panti bermanfaat dan mendukung keberlanjutan pelayanan panti sosial di Kota Medan, maka diperlukan data dan informasi obyektif tentang pelaksanaan program dan hasil-hasil yang dicapai. Sehubungan dengan itu, dilaksanakan penelitian "Evaluasi Pelaksanaan Program Subsidi Panti dalam Mendukung Kelangsungan Pelayanan Panti Sosial".

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah (1) diketahuinya pemanfaatan subsidi panti oleh panti-panti sosial, (2) diketahuinya pengaruh subsidi pada: (a) pemenuhan kebutuhan permakanan klien, (b) pengembangan usaha ekonomis produktif panti; dan (3) diketahuinya upaya panti-panti sosial dalam mengatasi masalah pembiayaan kegiatan selanjutnya (setelah subsidi dihentikan).

Adapun manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai bahan masukan Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial – Departemen Sosial, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Sosial Kota Medan dalam pengembangan kebijakan dan program penguatan panti-panti sosial.

II. METODE YANG DIGUNAKAN

Jenis penelitian ini adalah *evaluative research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan terhadap 10 panti sosial dengan rincian Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) 8 unit, Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) 1 (satu) unit, Panti Sosial Cacat 1 unit dan Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) 1 (satu) unit. Penentuan panti sosial dengan teknik *purposive*, dengan mempertimbangkan (1) panti yang menerima program subsidi tahun 2005, (2) keragaman panti sosial, (3) keterjangkauan secara geografis. Untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung tujuan penelitian, informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu (1) penanggung jawab program di Dinas Sosial Kota Medan, (2) pengelola panti sosial dan (3) klien panti sosial. Keseluruhan responden dari ketiga kategori tersebut berjumlah 72 orang. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen panti sosial, literatur, hasil penelitian dan catatan tertulis lain yang relevan; wawancara mendalam dengan penanggung jawab program di instansi sosial dan pengelola panti sosial; serta *focus group discussion* (FGD) dengan klien.

Data yang telah dikumpulkan diolah, dan dikategorisasi kemudian dianalisis dengan teknik analisa konsep-konsep yang ditemukan, dan menguraikan esensi dan substansi yang tertuang dalam konsep-konsep tersebut, sebagai hasil penelitian, yaitu (1) mengetahui pemanfaatan subsidi, dan (2) upaya yang dilakukan panti untuk mengantisipasi apabila program subsidi dihentikan.

III. DESKRIPSI TEORITIS

A. Program Subsidi Panti

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/PRS-1/KPTS/2005 dan Nomor 02/PRS-1/KPTS/2005 Program Subsidi Panti terdiri dari *Subsidi Tambahan Biaya Permakanan dan Subsidi Biaya Usaha Ekonomis Produktif*

1. Subsidi Tambahan Biaya Permakanan

Program ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pelayanan sosial di dalam panti, baik milik pemerintah daerah maupun masyarakat. Departemen Sosial menetapkan alokasi

dana untuk tiap panti berdasarkan jumlah klien sesuai SK Menteri Sosial dan mekanisme penyaluran dana melalui PT Pos Indonesia. Adapun besarnya subsidi untuk permakanan per orang per hari berjumlah RP. 2.250 yang diberikan selama 365 hari.

2. Subsidi Biaya Usaha Ekonomis Produktif

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kemampuan panti-panti sosial sehingga mampu menumbuhkan, mengelola, mengembangkan dan meningkatkan usaha ekonomis produktif melalui subsidi yang diberikan; (2) menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan kemampuan dalam menggali, memanfaatkan sumber dan potensi di lingkungan sosialnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan klien; (3) membina dan mengembangkan tanggung jawab sosial yang dilandasi oleh jiwa kesetiakawanan sosial. Besarnya subsidi UEP untuk usaha baru sebesar Rp. 10 juta dan usaha pengembangan sebesar Rp. 25 juta.

Sasaran program ini adalah panti-panti sosial milik masyarakat dan pemerintah daerah, baik yang sudah mempunyai Usaha Ekonomis Produktif (UEP) maupun mempunyai prospek untuk maju dan berkembang atau yang belum tetapi ada potensi untuk mengembangkan UEP.

B. Pelayanan Sosial

Beberapa konsep termasuk didalam pelayanan sosial dalam bahasan ini, yaitu pengertian, tujuan dan fungsi pelayanan.

1. Pengertian Pelayanan Sosial

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan pelayanan sebagai suatu fungsi yang terorganisasi, merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada perorangan, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan kesatuan-kesatuan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang selalu mengalami perubahan (Soetarso, 1980). Kemudian

Walter A. Fredlander (Soetarso, 1980) mendefinisikan pelayanan sosial atau kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu perorangan dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka serasi dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

2. Tujuan Pelayanan Sosial

Tujuan pelayanan sosial menurut Anthony H. Pascal (M.R. Siahaan, 2004) adalah :

- a. Memberikan perlindungan kepada orang yang mengalami kehilangan kemampuan.
- b. Menyediakan pilihan-pilihan kepada penerima pelayanan. Setiap orang memiliki potensi diri dan masalah yang berbeda-beda, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda-beda pula.
- c. Mengembangkan keberfungsian sosial. Pelayanan sosial diberikan untuk membantu orang agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sosial dasar dan mampu melaksanakan peran sosialnya secara memadai.
- d. Meningkatkan keadilan untuk memperoleh kesempatan. Pelayanan sosial tidak dapat diberikan kepada kelompok orang tertentu saja, tetapi bersifat universal karena berkaitan dengan hak asasi manusia.
- e. Memelihara terpenuhinya kebutuhan minimal. Kebutuhan minimal seringkali diberi pengertian dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup setiap orang.

3. Fungsi Pelayanan Sosial

Fungsi pelayanan sosial (Soetarso, 1980), yaitu: (a) *Pencegahan*, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencegah meluasnya dampak masalah bagi individu, keluarga, kelompok dan komunitas; (b) *Rehabilitasi*, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan memulihkan kehidupan masyarakat, pembangunan rumah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi dan fasilitas publik; (c) *Pengembangan*, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan; (d) *Perlindungan*, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan rasa aman dan ketenangan dan (e) *Suportif*, yaitu serangkaian kegiatan untuk mendukung kegiatan sektor terkait.

C. Kebutuhan Dasar Manusia

Kebutuhan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari setiap makhluk hidup, atau dengan kata lain setiap makhluk hidup pasti memiliki kebutuhan. Pada manusia, kebutuhan ini sifatnya menuntut pemenuhan dengan sesegera mungkin. Sebab apabila tidak segera dipenuhi akan menimbulkan masalah pada manusia tersebut, baik masalah yang bersifat individual (*private trouble*) maupun gangguan yang bersifat kolektif (*public issues*). Menurut Neil Gilbert dan Haerry Spect (Sukoco, 1991), bahwa setiap manusia dimanapun dan kapanpun secara universal memiliki sejumlah kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik, emosional, intelektual, spiritual dan sosial.

Maslow membagi kebutuhan manusia menurut jenis dan hirarkinya, yaitu *pertama*, kebutuhan yang paling dasar diantara kebutuhan manusia adalah *kebutuhan untuk mempertahankan hidup*. Kebutuhan dimaksud antara lain makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen. Seseorang yang mengalami kekurangan makanan, maka ia akan memenuhi kebutuhan makan terlebih dahulu. Ia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya terpuaskan. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis ini memiliki pengaruh yang besar pada tingkah laku manusia.

Kedua, kebutuhan akan *perlindungan dan rasa aman*; *ketiga*, kebutuhan akan *cinta, kasih sayang dan rasa memiliki-dimiliki*. Orang akan

mendambakan hubungan penuh kasih sayang dengan orang lain pada umumnya, khususnya kebutuhan akan rasa memiliki tempat di tengah kelompoknya, dan ia akan berusaha keras untuk mencapai tujuan yang satu ini. Maslow berpendapat bahwa tanpa cinta pertumbuhan dan perkembangan kemampuan orang akan terhambat.

Keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini terdiri dari (1) harga diri, meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan dan kebebasan; (2) penghargaan dari orang lain meliputi *prestise*, pengakuan, penerimaan, perhatian, nama baik serta penghargaan. *Kelima*, kebutuhan akan aktualisasi diri, hasrat untuk tahu dan memahami, serta kebutuhan estetik. Aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang dilukiskan "hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri". Pada anak-anak rasa ingin tahu ini merupakan kebutuhan yang bersifat alamiah. Sedangkan estetik merupakan kebutuhan manusia akan rasa keindahan. Kemudian Selo Soemardjan (1997), membagi kebutuhan manusia menjadi tiga jenis, yaitu (1) kebutuhan dasar (*basic needs*); (2) kebutuhan sosial-psikologis (*social-psychological needs*); dan (3) kebutuhan pengembangan (*developmental needs*).

IV. HASIL PENELITIAN

A. Profil Panti Sosial

Pada profil panti sosial disajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang status panti, jangkauan subsidi, sumber daya manusia panti, sarana prasarana, sumber dana, dukungan masyarakat dan pemerintah.

1. Status dan Jenis Panti

Sasaran penelitian adalah panti-panti sosial yang memperoleh subsidi panti tahun 2005. Berdasarkan data pada Dinas Sosial Kota Medan panti-panti sosial yang memperoleh subsidi sebanyak 27 panti sosial. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 panti sosial menjadi sampel dalam penelitian ini, yang seluruhnya berstatus milik swasta atau masyarakat. Kemudian dilihat dari jenis panti sosial dan jumlah klien sebagai berikut :

PANTI SOSIAL PENERIMA PROGRAM SUBSIDI

NO	JENIS PANTI	PANTI	KLIEN
1.	Panti Sosial Asuhan Anak	8	794
2.	Panti Sosial Tresna Werdha	1	50
3.	Panti Sosial Penyandang Cacat	1	78
4.	Panti Sosial Pamardi Putra	1	85
JUMLAH		10	1.007

Sumber : Hasil Penelitian, 2006.

2. Jangkauan Subsidi

Subsidi panti yang diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pelayanan pada panti sosial, pada kenyataannya belum menjangkau seluruh klien. Dari 27 panti sosial yang ada di Kota Medan, klien yang terjangkau pelayanan sebesar 1.653 orang. Berdasarkan data sampel dari 10 panti sosial, jumlah klien dalam panti sosial yang baru terlayani rata-rata sebesar 61,72 persen.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) Panti

Ketersediaan SDM Panti merupakan unsur penting dan sangat menentukan keberlanjutan pelayanan pada panti sosial. Hasil penelitian menunjukkan, SDM panti dalam sampel penelitian ini (10 panti sosial) dilihat dari tingkat pendidikannya sudah memadai, dimana 78,01 persen berpendidikan SLTA dan 24,82 persen berpendidikan akademi/perguruan tinggi.

4. Sarana dan Prasarana

Unsur lain yang tidak kalah penting adalah tersedianya sarana dan pra-sarana, baik jenis, jumlah maupun unsur teknologinya.

a. Sarana/Prasarana Umum

Sarana/prasarana yang pada umumnya tersedia dalam panti sosial. Sarana/prasarana ini terkait dengan kegiatan perkantoran, seperti gedung perkantoran dan peralatan kantor. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terkait dengan sarana/prasarana umum ini, seluruh panti sosial sudah memadai. Bahkan enam panti sosial sudah menggunakan komputer. Tersedianya komputer ini bukan sebagai

trend (mengikuti era teknologi), tetapi menggambarkan bahwa panti sosial telah didukung dengan teknologi modern untuk memperlancar kegiatannya.

b. Sarana/Prasarana Teknis Pelayanan

Sarana/prasarana yang pada umumnya tersedia dalam panti sosial berdasarkan kebutuhan pelayanan klien, seperti ruang konseling/wawancara, peralatan bimbingan dan pelatihan, dan sebagainya (*hardware* maupun *software*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan sarana/prasarana teknis pelayanan ini pada umumnya belum cukup memadai, baik jenis, jumlah, maupun unsur teknologinya. Terutama untuk *software*, pada umumnya panti sosial belum memiliki pedoman pelak-sanaan maupun pedoman teknis dan buku standarisasi panti sosial. Keterbatasan ini menyebabkan masih lemahnya keterampilan petugas pelayanan teknis panti sosial. Pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis panti sosial pada umumnya diperoleh dari tenaga yang sudah lama di panti sosial atau terjadi proses transfer ilmu dan keterampilan dari tenaga senior. Sebagian tenaga teknis lainnya memperoleh keterampilan teknis pelayanan sosial dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

c. Sumber Dana Panti Sosial

Ketersediaan sumber dana merupakan penentu keberlanjutan pelayanan pada panti-panti sosial. Sebaik apapun program disusun, tanpa adanya dukungan dana yang memadai maka program tersebut hanya menjadi dokumen saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya panti sosial memiliki sumber dana tetap antara 2 – 3 sumber, antara lain Yayasan Dharmais, Dinas Sosial Provinsi, donatur (perorangan), sumbangan masyarakat dan hasil usaha sendiri dari mengelola UEP. Seluruh panti sosial sudah mampu menggali sumber dana sendiri melalui usaha ekonomis produktif (UEP), seperti toko, wartel, pertukangan, *paving block*, rental komputer, dan lain-lain.

Kemudian sumber dana tidak tetap antara 1 – 2 sumber, organisasi sosial, perorangan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dan organisasi kemasyarakatan.

d. Dukungan Masyarakat

Panti-panti sosial sebagai lembaga pelayanan tidak dapat terlepas dari lingkungan sosial. Dalam proses pelayanan sosial, lingkungan sosial dimana panti-panti sosial itu berada merupakan bagian di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa panti-panti sosial memperoleh dukungan dari masyarakat. Berbagai bentuk dukungan yang teramati antara lain bantuan kebutuhan permakanan dan pelayanan kesehatan bagi klien yang diberikan oleh masyarakat (baik secara individu maupun organisasi). Hubungan atau dukungan dari masyarakat seperti ini perlu dipelihara dengan baik, yaitu dengan tetap menjalankan kepercayaan (amanah) yang diberikan oleh masyarakat kepada panti sosial tersebut.

e. Dukungan Pemerintah

Panti-panti sosial merupakan mitra kerja pemerintah (dalam arti luas/bukan hanya dengan Dinas Sosial). Apabila melihat pelayanan di dalam panti-panti sosial yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan keterampilan maka tentunya instansi pemerintah sektoral berkepentingan untuk mendukung panti-panti sosial. Dalam penelitian ini, instansi pemerintah yang masih dominan memberikan dukungan terhadap panti-panti sosial adalah Dinas Sosial. Sedangkan dukungan dana instansi pemerintah lain, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dukungannya belum signifikan, karena masih bersifat insidental.

B. Pelayanan dalam Panti

Hasil penelitian dan pembahasan tentang pelayanan dalam panti difokuskan pada kebutuhan dasar, kebutuhan sosial-mental spiritual, kebutuhan berprestasi dan kemandirian secara ekonomis.

1. Kebutuhan Dasar

Termasuk ke dalam kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok ini yaitu makan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Panti-panti sosial sudah memberikan pemenuhan kebutuhan dengan baik. Khusus untuk pemenuhan kebutuhan permakanaan, klien makan 3 kali sehari dengan menu 3 sehat plus, yaitu nasi, sayur, lauk dan kadang-kadang buah atau susu, serta seminggu dua kali makanan tambahan (kacang ijo, biskuit, kue-kue).

Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan pakaian, pada umumnya panti-panti sosial sudah memberikan pakaian sebanyak 2-3 pasang/tahun. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pakaian dan kebersihan diri, klien juga memperoleh peralatan mandi dan cuci yang diberikan seminggu sekali.

Untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, pada umumnya klien menempati asrama secara kelompok yaitu 8 – 20 orang/kamar. Selain model asrama, terdapat dua panti sosial menempatkan kliennya dengan model *cottage*. Pada umumnya kondisi tempat tinggal cukup memadai, yaitu bersih, teratur/tertata dan dilengkapi dengan sarana khusus untuk lanjut usia. Namun demikian, dalam penelitian ini ditemukan ada panti dengan model asrama yang satu kamar diisi oleh 20 orang. Hal ini tentu kurang mendukung proses pelayanan, karena kebutuhan yang bersifat pribadi (*privacy*) kurang memperoleh perhatian. Selain itu, dengan kondisi tempat tinggal demikian apabila ada klien yang sakit akan memudahkan penularan penyakit, terutama penyakit flu seperti batuk, pilek dan sakit mata.

Selanjutnya, dalam upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan panti memberikan pelayanan pengobatan. Bagi klien yang sakit atau perlu perawatan khusus, panti merujuk ke balai pengobatan ataupun Puskesmas terdekat yang pada umumnya sudah terjalin kerjasama dengan panti sosial. Panti sosial juga menjalin kerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, khususnya untuk

perawatan gigi. Kemudian panti sosial juga mengadakan konsultasi dengan Puskesmas, khususnya ahli gizi berkaitan dengan penentuan menu permakanaan klien.

2. Kebutuhan Sosial dan Mental-Spiritual

Kesadaran bahwa seseorang merupakan bagian dari orang lain atau kelompok merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Karena itu, orang secara individu perlu mengembangkan pikiran, perasaan dan perilaku sosial yang didasari oleh kesadarannya sebagai makhluk sosial. Selain sebagai makhluk sosial, bahwa setiap orang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Karena itu, setiap orang secara pribadi perlu memahami jati dirinya sebagai hamba Tuhan. Pemikiran ini yang mendasari perlunya dikumpulkan informasi tentang bimbingan sosial dan mental-spiritual pada panti sosial.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa panti-panti sosial telah menyelenggarakan bimbingan sosial bagi klien. Berbagai bentuk bimbingan sosial tersebut terpadu dalam kegiatan kesehatan, olah raga, kesenian, rekreasi, kerja bakti sosial dan membuat aturan-aturan bersama, dan lain sebagainya.

Kemudian terkait dengan kebutuhan mental-spiritual, panti-panti sosial pada umumnya menyelenggarakan bimbingan kerohanian (keagamaan), penanaman disiplin, pemberian sanksi bagi klien yang bersalah dan pemberian hadiah bagi klien yang berprestasi. Bimbingan sosial maupun mental-spiritual ini mampu membentuk perilaku disiplin dan tanggung jawab sosial klien, yang ditandai dengan relasi sosial yang diwarnai nilai kekeluargaan, kepedulian sosial dan kebersamaan antara klien serta toleransi dalam kehidupan beragama.

3. Kebutuhan Berprestasi dan Kemandirian Ekonomis

Setiap orang pada dasarnya memiliki potensi dan bakat yang perlu dikembangkan agar mampu menjalani kehidupan dengan baik. Dalam upaya mengembangkan potensi klien, sebagian panti telah mengajarkan keterampilan

yang diharapkan dapat menjadi bekal nanti setelah klien siap hidup mandiri.

Berbagai jenis pengembangan potensi yang diselenggarakan panti-panti sosial antara lain pelatihan komputer, pembuatan *paving block*, batako, pertukangan, kerajinan tangan, dan lain-lain.

Selain bertujuan pengembangan potensi diri klien, pelatihan-pelatihan tersebut ternyata berdampak positif bagi panti sosial, yaitu menjadi salah satu sumber pembiayaan panti sosial.

C. Subsidi Panti

Bantuan sosial melalui program subsidi panti merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Meskipun demikian, disebabkan oleh keterbatasan keuangan negara (dalam hal ini Departemen Sosial) maka subsidi panti belum dapat menjangkau seluruh panti sosial di Indonesia.

Disebabkan adanya keterbatasan ini, maka Dinas Sosial diberikan kesempatan untuk menentukan pendekatan dan strategi penyaluran subsidi panti sesuai dengan kondisi setempat. Namun demikian Dinas Sosial perlu memahami bahwa subsidi ini tidak bermaksud meng-cover seluruh kebutuhan panti sosial. Akan tetapi lebih merupakan stimulus bagi panti-panti sosial dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

1. Besarnya Subsidi Panti

Subsidi yang disalurkan ke panti-panti sosial dihitung berdasarkan per orang per hari. Atas dasar perhitungan tersebut, maka panti sosial akan menerima dana sebesar jumlah klien dikalikan dengan besarnya subsidi dan dikalikan lagi 365 hari. Berdasarkan pedoman yang ada, pada tahun 2005 besarnya subsidi per orang per hari adalah Rp 2.250,-/tahun. Permasalahannya, tidak semua klien pada panti sosial disetujui sebagai penerima subsidi, dan tidak ada ketentuan yang tegas berapa persen dari populasi klien panti sosial yang disetujui sebagai penerima subsidi.

Hasil penelitian menunjukkan dengan subsidi sebesar Rp 2.250 tersebut, apabila

dibandingkan dengan kebutuhan riil permakanaan per orang per hari rata-rata dalam panti sosial, maka subsidi panti mendukung sebesar 17 persen dari beban panti-panti sosial yang besarnya Rp 15.000,-/orang/hari.

Selain menerima subsidi bidang permakanaan, panti-panti sosial juga menerima subsidi untuk mengembangkan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) sebesar Rp 10.000.000,-. UEP ini sepenuhnya ditentukan oleh panti sosial masing-masing sesuai kondisi setempat. Kemudian untuk panti yang dinilai UEP-nya berhasil diberikan dana pengembangan UEP sebesar Rp 25.000.000,-

2. Pemanfaatan Subsidi Panti

Berdasarkan pedoman yang ada (2005) ada 2 pemanfaatan subsidi panti yaitu (1) permakanaan, dan (2) pengembangan Usaha Ekonomis Produktif (UEP). Dengan demikian sesuai dengan pedoman tersebut, panti-panti sosial penerima subsidi tidak diperkenankan mengalihkan penggunaan bantuan tersebut.

a. Permakanaan

Panti-panti sosial telah memanfaatkan subsidi untuk menambah kebutuhan permakanaan, khususnya untuk pemberian makanan tambahan. Meskipun besarnya subsidi untuk permakanaan ini relatif kecil (Rp 2.250,-/orang/hari), namun panti sosial telah memanfaatkannya untuk seluruh klien panti.

b. Usaha Ekonomis Produktif

Panti sosial yang menjadi sampel dalam penelitian ini tidak seluruhnya menerima subsidi untuk UEP. Dari 10 panti sosial, lima panti sosial menerima subsidi untuk UEP dan satu panti sosial menerima subsidi untuk pengembangan UEP. Panti-panti sosial yang menerima subsidi untuk UEP telah memanfaatkan dengan baik. Sebagian subsidi untuk memperbesar aset/pengembangan dan sebagian yang lain membuka UEP baru.

Bagi panti-panti sosial yang mengelola UEP baru, subsidi belum

cukup memadai. Karena untuk UEP baru diperlukan dana berkisar Rp 25.000.000,-. Meskipun demikian, pengelola panti sosial dengan dana subsidi tersebut merasa optimis menjalankan UEP baru dengan tambahan modal dari sumber lain. Kondisi ini menggambarkan, komitmen pengelola panti sosial dalam bidang UKS dan tingginya pemahaman bahwa prinsip subsidi pemerintah merupakan stimulus, dan tidak mungkin menutupi semua kebutuhan.

3. Manfaat Subsidi

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa ada 2 pemanfaatan subsidi panti, yaitu permakanan dan UEP.

a. Permakanan

Aspek-aspek yang dicermati dari permakanan ini adalah frekuensi, kualitas (menu) dan makanan tambahan. Pada aspek frekuensi, antara sebelum dan sesudah subsidi, tidak ada perubahan. Artinya, subsidi tidak berpengaruh terhadap frekuensi makan klien yang seluruhnya 3 x sehari. Kemudian pada aspek kualitas (menu), seluruh panti sosial mengakui ada peningkatan. Artinya, subsidi berpengaruh terhadap kualitas (menu) makanan klien. Selanjutnya, pada aspek makanan tambahan, dari sebelumnya hanya tujuh panti menjadi 10 panti (seluruh sampel) yang memberikan makanan tambahan. Artinya, subsidi panti berpengaruh terhadap penyediaan makanan tambahan bagi klien.

Informasi yang dihimpun melalui FGD anak, bahwa ada peningkatan menu sehari-hari dan makanan tambahan pada dua tahun terakhir. Menu makan yang sebelumnya kurang bervariasi, kini semakin bervariasi, dan ada tambahan buah dan susu seminggu dua kali. Demikian juga untuk makanan tambahan, yang sebelumnya seminggu sekali kini menjadi seminggu dua kali dan lebih bervariasi, seperti kacang hijau, kolak, kue-kue dan biskuit.

Berdasarkan hasil penelitain ada 2 hal yang perlu dicatat, yaitu (a) dengan subsidi sebesar Rp 2.250,- panti sosial

dapat meningkatkan pemakanan klien, dan (b) meskipun subsidi hanya menjangkau sekitar 61,72 persen klien, subsidi tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh klien dalam panti sosial.

b. Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

Berdasarkan pertimbangan kondisi atau jenis panti sosial, maka tidak semua panti sosial memperoleh subsidi untuk UEP. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak lima panti sosial mengelola UEP. Berbagai UEP yang dikelola oleh panti sosial, seperti pembuatan *paving block*, batako, kerajinan tangan, pertukangan, menjahit, border, dan lain-lain.

Hasil penelitian juga menunjukkan, bahwa sebanyak empat panti sosial yang menerima subsidi untuk UEP, mengelola usaha baru. Selebihnya mengelola usaha yang ada (lama) dengan memanfaatkan subsidi untuk menambah peralatan kerja.

Kemudian dari aspek omset, dari lima panti sosial yang mengelola UEP, baru tiga panti sosial mengakui ada penambahan omset, baik dalam bentuk barang maupun uang. Selanjutnya, pada aspek penambahan asset, seluruh panti sosial belum ada penambahan. Meskipun ada peningkatan omzet, namun panti sosial tersebut belum dapat menghitung secara pasti peningkatan omsetnya. Belum ada pembukaan atas hasil dari pengelolaan UEP.

Dari pengelolaan UEP, panti sosial memperoleh tambahan sumber pembiayaan operasional, antara lain untuk perbaikan sarana/prasarana, bimbingan dan keperluan pendidikan klien.

D. Upaya Pembiayaan Panti

Untuk mengetahui kemandirian panti sosial, perlu diketahui upaya yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh panti sosial untuk mengatasi pembiayaan panti sosial.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa baru dua panti sosial yang sudah memiliki program/ rencana kerja untuk mengantisipasi pemutusan subsidi oleh pemerintah, yaitu (1) Mencari donatur baru, dan (2) Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) antara lain menjahit,

sablon, pertukangan, membuat lilin, dan pertunanan.

E. Harapan-Harapan Pengelola Panti

Sebagai upaya meningkatkan optimalisasi pelayanan sosial dalam panti sosial, perlu dihimpun informasi terkait dengan harapan-harapan panti sosial. Agar dapat memberikan pelayanan sosial secara berkesinambungan, pengelola panti sosial mengharapkan :

1. Agar program subsidi panti terus dilanjutkan. Pengelola panti sosial pada umumnya mengharapkan agar program subsidi panti terus dilanjutkan, mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil yang menurunkan daya beli panti-panti sosial.
2. Jumlah klien penerima klien subsidi panti ditambah lagi. Program subsidi panti selama ini belum menjangkau seluruh klien dalam panti. Hal ini menyebabkan panti-panti sosial masih merasa terbebani dengan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan klien. Maka dari itu, diharapkan jumlah klien penerima program subsidi panti untuk tahun depan dapat ditingkatkan.
3. Jumlah/besarnya subsidi per orang/hari ditambah lagi, karena masih jauh dari kecukupan pemenuhan permakanaan. Besarnya subsidi per orang per hari sebesar Rp 2.250,- relatif masih kecil apabila dibandingkan dengan besarnya anggaran per bulan untuk permakanaan. Diharapkan besarnya subsidi tersebut dapat ditingkatkan menjadi Rp 5.000 per orang per hari.
4. Besarnya subsidi untuk UEP ditambah, sehingga panti sosial dapat mengelola UEP secara optimal (terkait dengan jenis, omset, maupun asset. Untuk UEP baru panti sosial menerima biaya UEP sebesar Rp 10 juta dan untuk pengembangan UEP sebesar Rp 25 juta. Pada praktiknya dana UEP tersebut masih sulit dimanfaatkan, karena besarnya belum mencukupi untuk mengelola UEP. Selama ini, panti sosial mencari tambahan secara swadaya untuk dapat mengelola UEP. Diharapkan biaya UEP dapat ditingkatkan, UEP baru sebesar

Rp 15 juta dan UEP pengembangan sebesar Rp 40 juta.

V. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut yaitu aspek pemanfaatan subsidi, dan upaya panti apabila subsidi dihentikan. Aspek-aspek tersebut perlu pencermatan lebih mendalam karena berkaitan dengan efektivitas program saat ini, dan langkah-langkah ke depan guna mengoptimalkan kinerja program subsidi.

Berdasarkan hasil penelitian, manfaat subsidi bidang permakanaan terlihat pada peningkatan kualitas (menu) dan makanan tambahan. Peningkatan kualitas permakanaan dan pemberian makanan tambahan ini berkaitan dengan asupan gizi klien, dan secara langsung akan mempengaruhi derajat kesehatan. Khusus untuk anak akan mempengaruhi proses tumbuh-kembang serta kecerdasan mereka.

Sedangkan manfaat untuk pengembangan UEP, usaha yang dikelola panti sosial belum memberikan manfaat kepada panti secara signifikan. Panti sosial pada umumnya belum terampil memilih dan mengelola UEP. Kondisi ini disebabkan tidak adanya pelatihan UEP dan pendampingan. Skema penyaluran subsidi untuk pengembangan UEP seperti ini tentu saja tidak tepat, dan dana yang disalurkan juga kurang mendukung pencapaian tujuan program.

Dilihat dari peruntukan program subsidi, menggambarkan bahwa program subsidi panti masih mengarahkan tujuannya pada upaya penyelamatan panti sosial dari situasi yang mengancam kelangsungannya, atau lebih bersifat *emergency services*. Pedoman yang membatasi pemanfaatan subsidi khusus di bidang permakanaan dan pengembangan UEP, pada prakteknya menyulitkan panti sosial itu sendiri. Sebenarnya untuk permakanaan, pada umumnya panti-panti sosial masih berkecukupan karena banyak bantuan bahan makanan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Justru sebenarnya panti sosial membutuhkan bantuan untuk pendidikan, pelatihan dan perawatan kesehatan klien. Untuk menyikapi aturan

sebagai dituangkan di dalam buku pedoman, maka panti-panti sosial secara administrasi tetap memenuhi aturan yang berlaku, meskipun dalam prakteknya memanfaatkan sebagian subsidi bidang permakanaan untuk kegiatan operasional lainnya.

Kemudian subsidi di bidang pengembangan UEP, secara nominal jumlah subsidi UEP baru sebesar Rp 10 juta dan pengembangan UEP sebesar Rp 25 juta sudah memadai. Permasalahannya pencairan subsidi di bidang UEP tersebut tidak diikuti dengan pelatihan keterampilan dan manajemen UEP dan pendampingan. Hal ini yang menyebabkan panti sosial tidak bertahan lama dalam mengelola UEP dikarenakan UEP yang dipilih tidak *marketable*. Oleh karena panti-panti sosial tersebut tidak menguasai UEP, maka meskipun program subsidi sudah memasuki tahun kedua, pengelolaan UEP hasilnya belum signifikan, dan bahkan ada yang terancam bangkrut.

Berikutnya mengenai upaya *exit strategy* panti sosial. Pada umumnya panti sosial masih memiliki ketergantungan cukup kuat terhadap pemerintah *cq.* Departemen Sosial untuk pembiayaan kegiatan operasional. Mereka pada umumnya masih mengharapkan subsidi dari pemerintah. Hal ini tentu tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 1974 sebagaimana diuraikan di pendahuluan. Memang, pemerintah tetap berkewajiban mendukung panti sosial karena mereka adalah mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Namun demikian seyogyanya anggaran untuk subsidi panti semakin dikurangi melalui pemandirian panti sosial. Oleh karena itu, program subsidi panti akan lebih bermakna apabila alokasi dana terbesar diarahkan pada pengembangan UEP. Melalui upaya ini maka secara bertahap ketergantungan panti sosial terhadap pemerintah dapat dikurangi.

VI. PENUTUP

Program subsidi panti merupakan respon Departemen Sosial terhadap dampak krisis ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan panti dalam menyelenggarakan pelayanan sosial. Pada prakteknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa subsidi panti baru menjangkau 61 persen klien dan besarnya subsidi berkisar 17 persen dari alokasi biaya panti sosial. Artinya, sebagian besar pemenuhan permakanaan klien, masih menjadi tanggung jawab panti sosial. Manfaat yang dirasakan panti sosial dengan adanya program subsidi panti bidang permakanaan ini, adalah adanya peningkatan kualitas dan pemberian makanan tambahan.

Kemudian di bidang pengembangan UEP, subsidi belum memberikan manfaat yang signifikan bagi panti-panti sosial karena beberapa keterbatasan, yaitu subsidi kurang memadai, tidak adanya pelatihan keterampilan, tanpa didahului studi kelayakan dan tidak adanya pendampingan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang perlu dipertimbangkan oleh Departemen Sosial RI dalam upaya kelangsungan pelayanan pada panti sosial, yaitu (1) pengembangan pemanfaatan subsidi untuk kesehatan, pendidikan dan keperluan lainnya, (2) perlu dilaksanakan pelatihan UEP dan pendampingan untuk pengelolaan UEP, (3) subsidi untuk pengembangan UEP perlu ditingkatkan karena pada jangka panjang akan berpengaruh pada pemutusan mata rantai ketergantungan panti-panti sosial dengan pemerintah. Kemudian saran kepada Dinas Sosial provinsi adalah perlunya monitoring dan evaluasi secara intensif untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi panti sosial berkaitan dengan proses maupun hasil kegiatannya.

DAFTAR PUTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2005, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, Jakarta, UI-Press.
- Compton Beulah R and Burt Galaway, 1989, *Sosial Work Processes, Fourth Edition*, California, Cole Publishing Company.
- Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, 2000, *Standarisasi Panti Sosial Puslitbang Kesejahteraan Sosial*.

- Departemen Sosial RI 2003, *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Tambahan Biaya Perumahan/Gizi*, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- , 2003, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Usaha Ekonomi Produktif*, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- Frank G. Globe, 1987, *Mazhab Ketiga – Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Yogyakarta, Kanisius
- Jones, Andrew and John May, 1995, *Working in Human Service Organisations : A Critical Introduction*, Malaysia, Longman.
- May, John and Andrew Jones, 1995, *Working in Human Service Organisations : A Critical Introduction*, Malaysia, Longman.
- Selo Soemardjan, Selo, 1997, "Kemiskinan Pandangan Sosiologi", *Jurnal Sosiologi*, Indonesia, Nomor 2/September 1997, Jakarta, Ikatan Sosiologi Indonesia.
- Shortell, S.M. and Richardson, W.C. 1978, *Health Program Evaluation*, Saint Louis, The C.V Moshy Company.
- Soetarso, 1980, *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial, dan Kebijakan Sosial*, Bandung, KOPMA Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Siahaan, MPR, 2004, "Beberapa Catatan dalam Praktek Pekerjaan Sosial", Makalah dokumen pribadi (tidak diterbitkan).
- Siporin, Max, 1975, *Introduction to Sosial Work Practice*, New York, Mac Millan Phubliser Co. Inc.
- Suhartono, Irawan, 1999, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Rineka Cipta.
- Sukoco, Dwi Heru, 1991, *Profesi Pekerjaan Sosial*, Bandung, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Publisher.

BIODATA PENULIS :

Suradi, Ajun Peneliti Madya Bidang Kebijakan Sosial di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.